

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah utama yang tengah dihadapi oleh seluruh negara didunia, termasuk Indonesia. Kemiskinan yang menjadi permasalahan saat ini menjadi salah satu faktor penghambat tujuan suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menyebabkan kualitas sumber daya manusia menjadi rendah, dimana masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan(Suparmadi & Santoso, 2019)

Pemerintah mengadakan berbagai program penanggulangan kemiskinan salah satunya dengan memberikan bantuan berupa bantuan sosial (Bansos) yang diberikan kepada keluarga miskin. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepala individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sifat bantuan ini tidak secara terus menerus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Seperti pada kecamatan Lubuk Basung yang memiliki jumlah penduduknya yang cukup besar dimana banyak jumlah penerima bantuan sosial.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) digunakan untuk memudahkan pengambilan keputusan dan berguna dalam pengambilan keputusan yang terkait

masalah seleksi penerima bansos untuk masyarakat miskin, sehingga dapat menentukan penerima bansos secara tepat sasaran dalam penyalurannya. Metode yang diterapkan dalam pengambilan keputusan yaitu metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk perankingan alternatif penerima bansos berdasarkan kriteria yang ada (Ariyanto & Aji Supriyanto, 2022).

Simple Additive Weighting (SAW) merupakan bagian dari *Multi Criteria Decision Analysis* (MCDA) yang bertujuan untuk memecahkan masalah optimasi dengan multi tujuan dengan mengevaluasi faktor-faktor yang beragam dalam pengambilan keputusan. Metode SAW adalah salah satu strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah keputusan multi-atribut (Supriyanto et al., 2022).

Dalam kaitannya dengan Bantuan Sosial adalah orang yang ahli dalam masalah penerima Bansos atau orang yang mengerti permasalahan Bansos. Sehingga SAW merupakan alat pengambil keputusan untuk menguraikan suatu permasalahan kompleks dalam struktur hirarki menggunakan banyak tingkatan yang terdiri atas tujuan, kriteria, dan alternatif. Hirarki yaitu suatu representasi dari suatu permasalahan yang kompleks dalam struktur multilevel, dimana level pertama merupakan tujuan yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan menjadi kelompok-kelompok kemudian diatur membentuk hirarki sehingga masalah nampak terstruktur dan sistematis (Supriyanto et al., 2022).

Berdasarkan Pemaparan Diatas, Sehingga penulis tertarik untuk merancang dan membuat sebuah sistem dengan mengangkat sebuah judul penelitian yaitu : **“Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW)**

Pada Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan Sosial Di Kantor Camat Lubuk Basung Berbasis Web”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis membuat perumusan masalah yang jelas supaya tugas akhir ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang sebuah sistem untuk membantu Pihak Kantor Camat Lubuk Basung agar sistem dapat digunakan dengan mudah dan tepat guna ?
2. Bagaimana penilaian secara objektif yang dilakukan untuk menentukan warga yang layak menerima Bantuan Sosial sehingga tepat sasaran?
3. Bagaimana merancang aplikasi yang mudah digunakan oleh Pihak Kantor Camat Lubuk Basung dalam pemberian Bansos dan dapat mengolah data dengan cepat dan akurat ?
4. Bagaimana merancang aplikasi website yang mudah digunakan oleh Pihak Kantor Camat Lubuk Basung dan dapat menyimpan data dengan aman dan meminimalisir terjadi kehilangan data ?
5. Bagaimana melakukan penerapan metode *Simple Additive Weighting* dalam pemilihan penerima bantuan sosial pada Kantor Camat Lubuk Basung menggunakan bahasa Pemrograman PHP dan Database MySql ?

1.3 Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan sementara atau pemecahan masalah yang bersifat sementara dimana akan dibuktikan dengan hasil penelitian yang akan

dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan merancang sistem pendukung keputusan dapat membantu pihak Kantor Camat Lubuk Basung dalam memberikan Bansos dapat dilakukan dengan mudah dan akurat.
2. Diharapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam pemberian Bansos pada Kantor Camat Lubuk Basung dapat digunakan dengan mudah dan dapat mengolah data dengan cepat dan akurat.
3. Diharapkan dengan menggunakan database MySQL data dalam pemberian Bansos pada Kantor Camat Lubuk Basung dapat disimpan dengan baik dan aman.
4. Diharapkan dengan adanya sebuah sistem informasi agar nantinya dapat mempermudah segala urusan dalam setiap kegiatan pada Kantor Camat Lubuk Basung dalam upaya penerimaan Bantuan sosial.
5. Diterapkannya metode *Simple Additive Weighting* dalam pemberian Bansos pada Kantor Camat Lubuk Basung agar dapat menganalisis data secara akurat.

1.4 Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam laporan penelitian ini, maka diterapkan batas-batas terhadap sistem yang akan diteliti, hal ini dimaksudkan agar langkah-langkah pemecahan masalah tidak menyimpang, adapun ruang lingkup penelitian diambil antara lain :

1. Sistem yang dibangun ialah sistem yang bisa menginput kriteria-kriteria

yang ada pada pemberian Bansos berbasis Bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.

2. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh sistem diantaranya, memberikan keputusan yang tepat dari kriteria-kriteria yang ada dengan metode *Simple Additive Weighting*.
3. Output yang dihasilkan dari sistem ini berupa Keputusan dalam Pemberian Dana Bantuan Sosial yang tepat dan akurat.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Merancang sistem pendukung keputusan berbasis web untuk melakukan perhitungan dalam pemberian dana Bantuan Sosial.
2. Menerapkan metode *Simple Additive Weighting* untuk melakukan perhitungan berdasarkan kriteria-kriteria pemberian Bansos.
3. Menerapkan metode *Simple Additive Weighting* untuk mengetahui keputusan dari pemberian dana Bansos.
4. Membantu pemakai (*user*) untuk mengatasi masalah yang sering terjadi yaitu dalam pemberian dana Bansos.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan.

Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat

dipecahkan secara tepat dan akurat, maka akan nampak manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan kemudahan untuk mengetahui informasi lebih cepat mengenai Pemberian Dana Bantuan Sosial.
2. Memberikan pengetahuan dan perhitungan secara tepat dalam Pemberian dana Bantuan Sosial.

1.7 Tinjauan Umum Objek Penelitian

Tinjauan umum perusahaan adalah sebuah penelitian tentang Objek Penelitian, struktur organisasi, serta deskripsi jabatan yang ada pada Kantor Camat Lubuk Basung tempat diterapkannya Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemberian Bantuan Sosial.

1.7.1 Sejarah Perusahaan Tentang Objek Penelitian

Kecamatan Lubuk Basung sebagai salah satu Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Agam yang mempunyai luas 70,30 km² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kec. Ampek Nagari

Sebelah Selatan : Kab. Padang Pariaman

Sebelah Timur : Kec. Tanjung Raya

Sebelah Barat : Kec. Tanjung Mutiara

Ketinggian dari permukaan laut 102 M dengan kelembaban rata-rata 83% dan curah hujan H.108 MM Dengan kondisi topografi sebagai hamparan berbukit, sungai, yang meliputi persawahan, kebun dan perumahan. Sungai yang

terkenal adalah Batang Antokan, dan Batang Kalulutan. Kecamatan Lubuk Basung dialiri sungai Batang Antokan, serta memiliki Bukit yaitu bukit Barabah Putih yang terletak di Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh.

Kecamatan Lubuk Basung terdiri dari 85.794 Jiwa penduduk yang terdiri dari 35.039 jiwa penduduk laki-laki 43.275 jiwa penduduk perempuan dengan 21.892 Kepala Keluarga. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk

NO	NAGARI	JENIS KELAMIN		TOTAL	JML KK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6
1	Lubuk Basung	23.781	23.283	47.064	12.467
2	Geragahan	4.015	3.835	7.850	22.077
3	Kampung Pinang	1.799	2.206	4.005	900
4	Kampung Tangah	3.647	3.563	7.210	2.040
5	Manggopoh	11.500	11.037	22.537	5.922
	JUMLAH	43.275	42.519	85.794	21.892

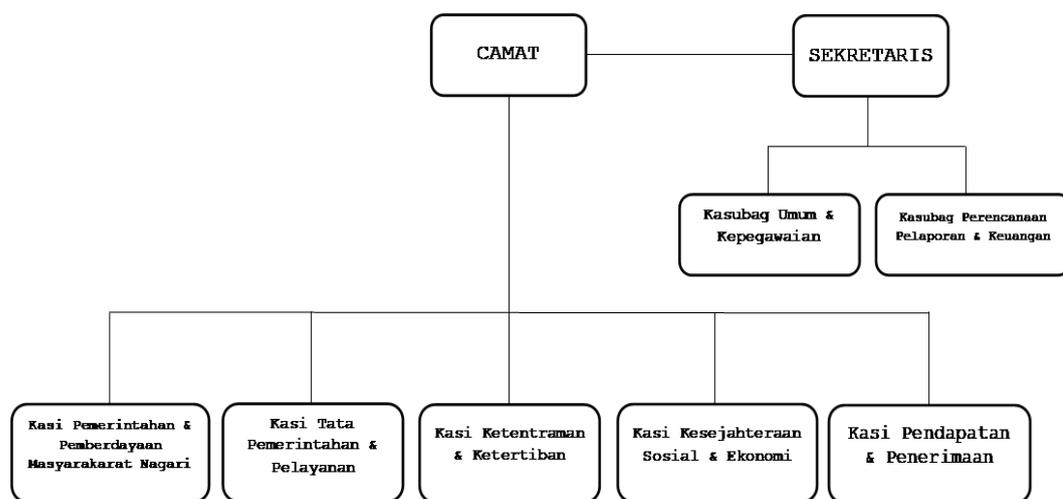
Sumber. KSK Lubuk Basung

Pada prinsipnya pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan berdasarkan kepada PP No 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, Perda Kabupaten Agam No 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan tanggal 7 Juli 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah

Tahun 2011 Nomor 3); Peraturan Bupati Agam Nomor 70 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Kecamatan.

1.7.2 Struktur Organisasi Objek Penelitian

Struktur Organisasi merupakan gambaran formal organisasi yang menunjukkan adanya pemisahan fungsi, uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang disusun untuk membantu pencapaian hasil usaha perusahaan serta pengendaliannya secara efektif.



Sumber: Kantor Camat Lubuk Basung

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Objek Penelitian

1.7.3 Tugas dan Wewenang

Kantor Camat Lubuk Basung menetapkan tugas dan wewenang untuk masing-masing bagian yang ada pada Kantor Camat Lubuk Basung. Adapun Tugas dan wewenang pada bagian struktur organisasi diatas yaitu :

1. Camat
 - a. Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi,

eselonering, Tugas fungsi dan Uraian tugas serta Tata kerja pada Kecamatan;

- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

2. Sekretaris

- a. Penyusunan rencana program kegiatan Kecamatan dan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Penyusunan norma, standarisasi dan prosedur yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan administrasi umum meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi, tata laksana, humas dan perlengkapan;

3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimbau dan mempelajari peraturan perundangundangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;

- c. Mencari, mengumpulkan, menghimbau, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
4. Kasubbag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - c. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), RENSTRA serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 5. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dan penyusunan rencana kegiatan;

- c. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Tata Pemerintahan;

6. Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan

- a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistematiskan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Pelayanan Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- b. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum;
- c. Melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Desa dengan sumber data yang ada;
- b. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;

8. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya dengan sumber data yang ada;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya ;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas kesejahteraan sosial dan budaya;

9. Kepala Seksi Pendapatan dan Penerimaan

- a. Pemantauan, pengawasan dan membuat laporan realisasi pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana APBDes dan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan diwilayah Kecamatan Bantan;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi, dan laporan kegiatan keuangan dinas;
- c. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan;